

TAJUK RENCANA

Menggagas Pilkada Yogya Ramah Lingkungan

PEMILIHAN umum kepala daerah (pilkada) secara serentak akan dilaksanakan November mendatang. Meski tahapan kampanye Pilkada 2024 serentak diadwalkan mulai 25 September hingga 23 November, namun 'parade' alat peraga kampanye (APK) sudah bermunculan. Di banyak tempat termasuk seantero DIY, ratusan APK bermunculan dan bertebaran. Mungkin tidak sesemarak kampanye pemilihan legislatif dan pemilihan presiden Februari lalu. Namun hakikatnya sama. Hanya kini lebih didominasi gambar-gambar wajah dalam baliho besar yang sejatinya mengganggu. Karena begitu ke luar rumah di ujung gang, jalan, perempatan bahkan jembatan penyeberangan akan 'menatap' wajah-wajah tersenyum mengesankan ramah. Seakan mereka mengisyaratkan sebagai calon pemimpin yang humanis bahkan populis, yang harus dipilih. Tentu saja, menjamurnya iklan bermuansa politik, tidak terelakkan. Ironisnya, mereka yang memasang - bisa pendukung, relawan atau biro pemasang iklan luar ruang - kadangkala kurang memahami aturan. Warga tahunya calon kepala daerah-lah yang tidak paham aturan ketika sejumlah figure baru disamping petahana, telah bermunculan melalui baliho. Mereka berusaha 'mencuri start' mengenalkan diri guna menarik perhatian masyarakat. Memasang logo partai politik, foto diri atau foto bersama calon pasangannya untuk pilkada bupati/walikota di DIY ini. Bukan sekadar nama dan gambar wajahnya tapi juga pesan-pesan politiknya. Satpol PP Kota Yogya cukup jeli dan teliti sehingga menerbitkan ratusan reklame yang dinilai melanggar. Dan yang ditertibkan pun dengan pelanggaran yang beragam. Tidak berizin, berizin tapi lokasi pemasangan tidak sesuai ketentuan. Tidak sedikit yang sudah memasang baru dimintakan izin. Mirisnya, ada iklan politik yang dipasang diikat di pohon, tiang penerangan jalan umum bahkan dipasang di pagar kantor pemerintah. (KR,

10/8). Padahal soal pemasangan reklame sudah diatur dalam ketentuan perda. Dimana Perda Kota Yogya No 6/2022 tentang Penyelenggaraan Reklame dalam pasal 9 ayat (2) huruf d terdapat ketentuan : bahwa reklame tidak boleh dipasang di pohon, tiang listrik, tiang telepon atau rambu lalu lintas. Perda tersebut juga mengatur bila iklan politik harus mendapat izin dan membayar pajak reklame. Persoalan iklan politik bukan hal baru. Tetapi upaya Pemkot Yogyakarta terus menegakkan aturan, Perda mendapat dukungan. Perda dihadirkan harus ditegakkan dengan tanpa pandang bulu. Artinya, institusi yang memang harus menegakkan aturan tidak perlu gamang melaksanakannya tugas. Ketika pemasangan tidak memperhatikan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan bahkan menghadirkan polusi visual. Bahkan mengakibatkan kota semrawut dan kotor. Kini tidak kalah penting adalah hadirnya kesadaran akan bumi yang kian rusak dan menumpuknya sampah plastik juga perlu dimiliki para politisi dan khususnya calon kepala daerah. Memikirkan kampanye lebih ramah lingkungan juga harus dilakukan relawan dan tim pendukung. Kajian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dapat memberikan gambaran. Saat Pilpres/Pileg Februari silam sampahnya mencapai 392 ton di seluruh Indonesia. KLHK kemudian menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri LHK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah yang timbul dari Penyelenggaraan Pemilu 2024.????????? Hingga kini, soal sampah di DIY terutama di Kota Yogya dapat dikatakan masih 'belum selesai'. Maka mengurangi sampai dari iklan atau reklame luar ruang ini perlu dilakukan maksimal. Mungkinkah Kota Yogya bisa menggagas dan melangkah dengan kampanye pilkada ramah lingkungan dan tertib aturan? Tentu ini harus mendapat dukungan partai politik dan kandidat kepala daerah peserta Pilkada 2024 untuk ikutserta bertanggungjawab melestarikan lingkungan. □f

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Tan-Sri Zulfikar Yusuf

(kaum Timur Asing) yang berkasta menengah, dan golongan *European* (orang Eropa/kulit putih) sebagai berkasta tertinggi. Dengan Pasal 27 UUD 1945 Indonesia menghapus diskriminasi rasial yang memuatkan ini: "segala warganegara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan...". Penjelasan Bung Hatta itu mencerdaskan pendapat beliau yang cermat,

hampir 79 tahun, telah melahirkan orang-orang pintar, yang dihasilkan oleh pendidikan tinggi nasional dan internasional. Tetapi banyak di antara orang-orang pintar ini yang secara moral dan etikal tidak cerdas kehidupannya. Mereka masih mengagumi dan merasa minder terhadap orang-orang asing. Mereka mudah tunduk kepada arahan Bank Dunia dan IMF yang tidak mengutamakan kepentingan nasional. Bahkan mereka sering dijuluki sebagai komprador-komprador asing yang mengabaikan nasionalisme dan kedaulatan bangsa.

Marilah kita memperingati hari lahir Bung Hatta serta memperingati cita-cita besar beliau untuk meningkatkan harkat martabat bangsa Indonesia, menanamkan rasa berdaulat atas dirinya dan mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa, tidak melakukan korupsi, tidak melakukan tindakan sosial yang memalukan dan tidak mengabaikan kepentingan rakyat.

Lebih dari itu mereka mampu berkarya untuk mengolah sendiri kekayaan alam Indonesia yang melimpah untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dari sinilah derajat kemanusiaan bangsa Indonesia akan terangkat, menjadi cerdas kehidupannya setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. □d

*) *Tan-Sri Zulfikar Yusuf,*
Pengamat Sosekbud.



KR-JOKO SANTOSO

bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah suatu "konsepsi budaya", bukan konsepsi ragawi. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa bukanlah sekadar mencerdaskan otak bangsa, tetapi adalah upaya mengangkat harkat martabat bangsa ini, sebagai upaya mempertinggi derajat kemanusiaan kaum *inlander*, yang sadar akan harga-diri dan jati-dirinya.

Barangkali hal ini relevan untuk kita bicarakan saat ini. Di zaman ketidaktentuan ini, tidak diragukan Indonesia yang telah merdeka selama

REFLEKSI PERINGATAN HARI UMKM 12 AGUSTUS 2024

Membaca Laju Perkembangan UMKM

HAMPIR semua data menunjukkan bahwa peran pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) sangat signifikan, terutama pada kontribusi tenaga kerjanya yang sangat dominan dalam perekonomian nasional atau daerah. Kisarannya mencapai lebih dari delapan puluh persen, namun sebenarnya tidak diikuti dengan kontribusi rupiahnya, yang masih berkisar antara 50-60 persen, sebagaimana kajian yang pernah dilakukan Dinas Koperasi UKM DIY tahun 2023. Artinya, jumlah yang besar tidak diikuti dengan sumbangsih rupiah yang signifikan. Bahkan meski jumlah pelaku UMKM di DIY yang diperkirakan mencapai hampir satu juta pelaku usaha, belum mampu memberikan daya saing.

Apabila berkaca pada data SIBAKUL, laman resmi Dinas Koperasi UKM DIY, sembilan puluh persen anggota SIBAKUL merupakan pelaku usaha mikro. Dominasi pelaku usaha mikro yang sangat besar ini harus dimaknai bahwa potret pelaku ekonomi didominasi oleh mereka yang memiliki produktifitas dan skala usaha yang masih sangat kecil. Sebagaimana manifestasi kebijakan Pemerintah bahwa pelaku UMKM harus naik kelas. Pelaku usaha mikro harus bisa bertransformasi menjadi usaha kecil dan seterusnya. Ini bukan perkara mudah, karena tatakelola bisnis pelaku UMKM sangat kompleks.

Ketika Dinas Koperasi UKM DIY men-generate tatakelola bisnis UMKM dalam perspektif enam aspek jejaring laba-laba, yang terdiri dari aspek : enterprener, produktifitas, kelembagaan, literasi keuangan, pemasaran, dan digitalisasi; menunjukkan sebenarnya sudah ada pergeseran skor ke arah yang lebih baik. Namun transformasi itu sudah berjalan masif walau belum mampu mengungkit pergeseran kelas secara signifikan. Tentu saja, pergeseran kelas dalam perspektif UMKM naik kelas tersebut, sangat kompleks permasalahannya, termasuk adanya pengaruh kondisi sosio-ekonomi global, tapi setidaknya ada beberapa hal yang bisa dilakukan dan dikondisikan.

Wisnu Hermawan

Orientasi Pasar atau 'Demand'

Sudah banyak produk UMKM yang dikreasi dan dikembangkan. Pendampingan pun sudah dilakukan oleh banyak pihak, tetapi mengapa hal itu belum terlihat efektif dan terkesan stagnan dalam postur ekonomi daerah. Mungkin, perspektif pengembangan produk harus digeser dari pendekatan basis produksi menjadi pendekatan apa yang sedang disukai atau dibutuhkan pasar. Permintaan terhadap produk atau jasa tertentu harus dapat porsi lebih, ketika melakukan pendampingan atau pembinaan kepada pelaku usaha. Tentu saja hal ini akan berimbas pada segmentasi pasar mana yang akan dibidik, pasar lokal atau justru wisatawan atau kalangan yang seperti apa.

Kita tidak menafikan pengembangan produk lokal yang berdaya saing tetapi harus realistis, pengembangan itu memperhatikan survei pasar yang akan disasar atau justru hanya sekadar berbasis pada potensi unggulan saja. Maka, pemetaan terhadap potensi pasar itu akan berdampak pada potensi permintaan atau pasokan dari mana saja dan kualitasnya akan mengikuti kebutuhan pasar. Maka, penanganan sentra dalam pengembangan kawasan seharusnya memperhatikan *supply-chain* perekonomian kawasan, yang penanganannya harus dilakukan secara terpadu. Keterpaduan itu selayaknya dilakukan sejak perencanaan dan dimaknai pencapaiannya dengan spirit kolaborasi, baik vertikal maupun horizontal.

Membangun Perdesaan Melalui Agribisnis

Tantangan berikutnya adalah menggerakkan sektor pengolahan dan pertanian yang harus diakui bahwa kontribusi perekonomiannya masih dominan. Artinya, menggerakkan ekonomi pertanian adalah menghidupkan agribisnis di produk

UMKM berbasis pertanian dari hulu hingga hilir, atau dikenal sebagai agribisnis, harus dilakukan untuk menumbuhkan ekonomi desa. Maka, pengembangan ekonomi berbasis agribisnis desa adalah penanganan yang harus dilakukan secara serempak dengan tetap memperhatikan arah pengembangan kawasan.

Pengembangan sentra UMKM dengan melihat arah pengembangan kawasan adalah mutlak dalam revitalisasi agribisnis perdesaan. Tenaga kerja di sektor agribisnis harus diakui sangat dominan yang harus mendapat pendampingan. Mencermati aspek ini, sebenarnya sudah banyak yang dilakukan Pemerintah Daerah, melalui pendekatan : padat karya pertanian, desa lumbung mataraman, desa wisata, desa budaya, desa prener, atau desa prima hingga UPPKA. Semua entitas itu adalah bentuk pemberdayaan yang harus dilakukan secara terarah dan terukur. Maka, untuk membawa UMKM benar-benar naik kelas, penguatan ekonomi desa melalui agribisnis secara berkelanjutan harus terus dilakukan, apapun label entitasnya. Saat ini saatnya saling bekerjasama, dan bukan lagi sekadar sama-sama bekerja. □d

*) *Wisnu Hermawan,* Kepala Bidang Kewirusahaan Dinas Koperasi UKM DIY.

Pojok KR

Harga Pertamax naik jadi Rp 13.700 -- Ikuti saja?

Banyak lansia belum mendapat layanan baik

-- Senior yang kadang dilupakan

Di Sukoharjo tanaman padi belum terpengaruh kemarau

-- Pengaruhnya semoga tidak menjadi bencana

Berabe

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MS. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **General Manager:** H Yoeke Indra Agung Laksana, SE. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklandryk23@yahoo.com, iklandryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk "Kedaulatan Rakyat Minggu"... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00 /mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan: H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang: Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil: Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil: Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan: Sri Warsiti.

Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil: Asrul Sani.

Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.